

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

Imam Mustakim

NPP. 31.0544

Asdaf Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: imamustakim6621@gmail.com

Dosen Pembimbing: Isman Hadijaya, S.AP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This study is based on the aspiration of the Indonesian nation for a prosperous life as stated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution, but the reality is that many people still live below the poverty line and do not receive adequate nutrition and healthcare, leading to health issues such as stunting. In order to realize zero stunting in Trenggalek Regency, the Trenggalek Regency Government has created a policy to accelerate integrated stunting prevention to reduce the number of stunted babies. **Purpose:** This research aims to find out how the policy to accelerate stunting prevention is implemented, the inhibiting factors, as well as efforts to overcome the factors inhibiting the implementation of the policy to accelerate stunting prevention as an effort to reduce the prevalence of stunting in Trenggalek Regency. **Method:** The method of research used is qualitative descriptive research with an inductive approach. The technique of data collection in this research through interviews, observations, and documentation. **Result:** The results of the study indicate that the Health, Population Control, and Family Planning Agency of Trenggalek Regency has made good efforts to reduce stunting rates, despite facing obstacles such as limited human resources, infrastructure, budget, and lack of coordination and public awareness, which are addressed through increased coordination, public awareness, human resource capacity, and cooperation with private parties or third parties. **Conclusion:** The implementation of the accelerated stunting prevention policy in Trenggalek Regency by the Health, Population Control, and Family Planning Agency has been effective, but further efforts are needed to overcome challenges to ensure the stunting prevalence continues to decline as targeted.

Keywords: Policy Implementation, Trenggalek Regency Government, Stunting Prevention

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berlatar belakang cita-cita bangsa Indonesia untuk hidup sejahtera sebagaimana tercantum dalam alinea keempat

Pembukaan UUD 1945, namun kenyataannya masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mendapatkan kebutuhan gizi serta pelayanan kesehatan yang layak, yang berdampak pada masalah kesehatan seperti *stunting*. Dalam rangka mewujudkan *zero stunting* di Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Kabupaten Trenggalek membuat kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi untuk mengurangi jumlah bayi *stunting*. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting*, faktor-faktor penghambat, serta upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* sebagai upaya penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Trenggalek. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek telah melakukan upaya penurunan angka *stunting* dengan baik, meskipun menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta kurangnya koordinasi dan kesadaran masyarakat, yang diatasi melalui peningkatan koordinasi, kesadaran masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, dan kerjasama dengan pihak ketiga atau para pelaku usaha. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* di Kabupaten Trenggalek oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sudah berjalan dengan baik, namun perlu upaya lebih untuk mengatasi kendala agar prevalensi *stunting* terus menurun sesuai target.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pencegahan *Stunting*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia untuk hidup sejahtera terdapat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia akan melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun, banyak rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mendapatkan kebutuhan gizi serta pelayanan kesehatan yang layak, yang berdampak pada masalah kesehatan seperti *stunting*.

Kesehatan merupakan bidang yang penting bagi keberadaan manusia dan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia (Dewa dan Heni, 2019). Kesehatan ialah kondisi yang tidak hanya terpaut pada terbebasnya dari sudut penyakit, melainkan kondisi sehat sempurna pada fisik, mental, dan sosial. Setiap warga negara Indonesia berhak menjalani kehidupan yang bermoral dan sehat (Dewa dan Heni, 2019). Namun, kenyataannya masih banyak rakyat yang tidak mendapatkan kebutuhan dasar, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti *stunting* akibat kurang gizi dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terganggu karena kurang gizi.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah normal akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang (Fitriani, dkk 2022). Di Indonesia, prevalensi *stunting* tercatat sebesar 21,6% pada tahun 2022, turun dari 24,4% pada tahun 2021. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi *stunting* nasional menjadi 14% pada tahun 2024. Di Kabupaten Trenggalek, upaya penurunan angka *stunting* dilakukan melalui kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dan kerja sama berbagai pihak untuk memastikan prevalensi *stunting* terus menurun sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun cita-cita bangsa Indonesia untuk hidup sejahtera telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, realitanya masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mendapatkan kebutuhan gizi serta pelayanan kesehatan yang layak. Kondisi ini berdampak pada berbagai masalah kesehatan, termasuk *stunting*, yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menurunkan angka *stunting*, termasuk Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta kurangnya koordinasi dan kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program penurunan angka *stunting* di Kabupaten Trenggalek.

Meskipun terjadi penurunan angka *stunting* di Kabupaten Trenggalek. Faktanya bahwa masih terjadi masalah terkait *stunting* di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Trenggalek yang menjadi hambatan untuk mewujudkan Kabupaten Trenggalek *zero stunting*.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks penegakan maupun terkait dengan permasalahan menara telekomunikasi.

Liza Diyah Ayu Rosanti (2023) meneliti Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Studi Di Kecamatan Sulang), dengan fokus pada upaya Dinas Kesehatan untuk mencapai target bebas *stunting* 2023 dan faktor penghambatnya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan penurunan angka *stunting* selama 2021-2023, dengan program yang memberikan dampak positif, terutama pada bayi *stunting*. Namun, pelayanan masyarakat masih kurang memadai dan pengetahuan gizi masyarakat rendah. Pemerintah diharapkan meningkatkan pelayanan dan edukasi gizi.

Yuli Zulaikha (2021) meneliti Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan *Stunting* Studi Kasus Di Puskesmas Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas. Pelaksanaan program pencegahan *stunting* di Puskesmas Air Beliti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, dengan fokus pada hubungan faktor internal dan eksternal organisasi terhadap kinerja program. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh karakteristik struktur instansi, jaringan komunikasi, dan jaringan eksternal. Namun, budaya organisasi dan kebutuhan masyarakat tidak

berhubungan dengan keberhasilan program *stunting*.

Farhan Damara (2023) meneliti Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George C Edward III. Hasil penelitian dari implementasi kebijakan *stunting* di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang sebagai pelaksana utama adalah bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan angka *stunting* di Kabupaten Sampang semakin tahun semakin menurun. Namun, dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala yaitu masih banyaknya pernikahan dini dan kurangnya taat administrasi bagi masyarakat pendatang.

Aspar Abdul Gani (2020) meneliti meneliti Studi Operasional Penurunan *Stunting* melalui Upaya Konvergensi di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian kualitatif menghasilkan model konvergensi penurunan *stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan keluarga.

Penelitian Megawati mengenai peran penting para kader posyandu dalam mendeteksi dan mencegah *stunting* di Desa Cipacing Jatinangor. Hasil dari penelitian ini diharapkan kader posyandu memahami sosialisasi informasi gizi optimal pada 1000 HPK, gizi seimbang, dan deteksi dini pendugaan *stunting* yang menjadi risiko penyebab *stunting* di wilayah kerja posyandu Desa Cipacing Jatinangor (Megawati & Wirahimihardja, 2019).

Shauma dan Purbaningrum (2022) meneliti Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan terkait ukuran dan tujuan dalam melaksanakan kebijakan sudah dibuat sesuai dengan amanat peraturan nasional dan sudah dijalankan. Sumber daya manusia yang berada di tingkat bawah khususnya kader masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas, untuk ketersediaan sumber daya anggaran sudah cukup baik. Karakteristik organisasi pelaksana, pembagian wewenang, ketersediaan SOP, dan pelaksanaan evaluasi pengawasan sudah dijalankan, namun masih terdapat pelaksana yang tidak memiliki SOP dalam menjalankan kebijakan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengevaluasi secara mendalam kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek dalam penurunan angka *stunting*, yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks lokal. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan upaya-upaya mitigasi yang diimplementasikan, memberikan wawasan baru tentang tantangan dan solusi spesifik yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan *stunting*. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai manajemen kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten serta memberikan rekomendasi praktis untuk

peningkatan efektivitas program pencegahan *stunting* di Indonesia.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* yang ada di Kabupaten Trenggalek serta memahami faktor-faktor penghambat dan upaya mengatasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, sehingga prevalensi *stunting* di Kabupaten Trenggalek dapat terus menurun sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Simangunsong, 2016). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 (sembilan) orang informan yang dipilih dengan metode wawancara semi terstruktur. Teknik purposif sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto, 2010). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, dan beberapa informan lain.

Sementara itu, dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi adalah tahap di mana sebuah kebijakan atau keputusan diterapkan untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan publik. Penulis menggunakan teori Edward III (dalam Agustino, 2006) untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Teori ini mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut adalah pendapat penulis berdasarkan data dan teori yang diungkapkan selama penelitian.

3.1.1 Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan dengan baik antara pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai sasaran. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan kebijakan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek dengan instansi terkait lainnya,

sangat diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas dan wewenang. Berdasarkan teori Edward III (dalam Agustino, 2006), terdapat tiga aspek komunikasi yang harus diperhatikan: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Proses transmisi melalui koordinasi telah dilakukan dengan baik untuk menyelaraskan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Kejelasan pesan komunikasi telah diupayakan melalui pembentukan tim pendampingan keluarga untuk membantu masyarakat memahami program kebijakan. Konsistensi dalam penyampaian informasi juga telah dipertahankan melalui forum "Rembug *Stunting*" dan forum diskusi lainnya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa implementor yang belum sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawabnya.

3.1.2 Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Trenggalek sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya yang meliputi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Staf yang cukup dan terampil memastikan pelaksanaan yang efektif, sementara informasi yang jelas dan panduan yang tepat dari Wakil Bupati membantu perangkat daerah memahami tanggung jawab mereka. Wewenang yang resmi dan tegas, seperti yang diberikan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, memungkinkan pelaksana di lapangan menjalankan tugas dengan baik sesuai regulasi.

Selain itu, fasilitas memadai seperti aplikasi e-PPGM, RSUD, Puskesmas, dan aula Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek mendukung operasional program. Dengan dukungan sumber daya yang baik, kebijakan percepatan penurunan *stunting* diharapkan dapat berjalan efektif dan mencapai target yang diinginkan.

3.1.3 Disposisi

Disposisi mencakup keinginan, kemauan, dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Menurut Edward III (dalam Agustino, 2006), ada dua aspek disposisi yang penting: pengangkatan birokrasi dan insentif. Pengangkatan birokrasi yang kompeten dan berintegritas dapat mendukung implementasi kebijakan dengan baik, seperti yang terlihat di Kabupaten Trenggalek, di mana para pelaksana kebijakan mendapatkan dukungan positif dari pemerintah daerah dan telah menunjukkan komitmen yang tinggi. Bupati Trenggalek mengukuhkan komitmen ini dengan mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS).

Selain itu, insentif memainkan peran penting dalam memotivasi pelaksana kebijakan. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek secara aktif memberikan apresiasi kepada para pelaksana, yang mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan kombinasi disposisi yang baik melalui pengangkatan birokrasi yang tepat dan pemberian insentif, kebijakan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat berjalan optimal dan mencapai hasil yang diinginkan.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu badan yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks kebijakan percepatan pencegahan stunting, struktur birokrasi memegang peran penting. Edward III (dalam Agustino, 2006) mengidentifikasi dua elemen utama struktur birokrasi: *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP adalah pedoman tertulis yang harus diikuti oleh pegawai untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti yang diterapkan di Kabupaten Trenggalek dalam upaya penurunan *stunting*. Pengelola Program Gizi di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, Yunita Sulistyaningsih, menyatakan pentingnya SOP yang efektif, meskipun saat ini belum ada SOP resmi, tahapan pemantauan pertumbuhan bayi telah dibuat sebagai panduan.

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab dan koordinasi antara berbagai dinas dan pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama. Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) mengatur pembagian tugas ini, memastikan semua dinas terkait bekerja bersama. Dengan demikian, struktur birokrasi di Kabupaten Trenggalek menunjukkan pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* yang terkoordinasi dan efektif.

3.2 Upaya

Untuk memaksimalkan penurunan angka *stunting* terdapat upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, yaitu meningkatkan kerja sama antara perangkat daerah terkait, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan sosialisasi kepada kelompok sasaran.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Trenggalek, dari 14% pada tahun 2018 menjadi 9,7% pada tahun 2022, menunjukkan keberhasilan kebijakan pencegahan yang diterapkan. Meskipun begitu, pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat masih kurang. Sama halnya dengan penelitian Liza bahwa terjadi penurunan angka *stunting* setiap tahun, akan tetapi masyarakat belum puas terhadap layanan yang diberikan (Liza, 2023).

Layaknya penelitian lainnya penelitian ini didukung sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi di bidangnya. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menangani *stunting*. Anggota tim percepatan penurunan *stunting* mulai dari Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan di puskesmas, hingga kader posyandu berperan penting dalam menyampaikan informasi. Layaknya temuan Megawati mengenai pentingnya peran tenaga kesehatan dan kader posyandu dalam penurunan angka *stunting* (Megawati & Wiramihardja, 2019).

Hambatan utama yang diidentifikasi yaitu kurangnya koordinasi dan komitmen pihak-pihak yang tergabung dalam tim penurunan *stunting*. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan multisektoral dan kolaborasi antara pemerintah, pelaksana kebijakan, dan sektor swasta untuk mengatasi *stunting* secara efektif dan mencapai target

yang ditetapkan. Berbeda dengan temuan Udzurotu bahwa kerjasama antar sector pemerintah terjalin dengan baik (Udzuratu Shauma & Gandini Purbaningrum, 2022).

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan holistik yang mencakup tidak hanya intervensi kesehatan tetapi juga faktor sosial dan ekonomi, seperti pendidikan dan akses pangan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta terbukti efektif, namun masih ada tantangan dalam meningkatkan koordinasi antar instansi dan mengatasi kesadaran yang kurang di tingkat keluarga. Temuan ini menyoroti perlunya peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan data yang akurat serta perbaikan dalam koordinasi dan pelaksanaan program-program pencegahan stunting.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan stunting secara efektif, tantangan signifikan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar pihak. Upaya yang dilakukan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta, menunjukkan hasil positif dalam penurunan prevalensi stunting. Namun, untuk mencapai target nasional di bawah 14% pada tahun 2024, diperlukan usaha lebih lanjut dalam mengatasi kendala yang ada dan memastikan implementasi kebijakan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini hanya sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*).

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dengan mengevaluasi dampak jangka panjang terkait implementasi kebijakan pencegahan *stunting* terhadap perkembangan anak dan kesejahteraan keluarga, serta membandingkan efektivitas program di berbagai daerah untuk mengidentifikasi praktik terbaik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta
- Aspar Abdul Gani. (2021). *Studi Operasional Penurunan Stunting Melalui Upaya Konvergensi Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah* (Doctoral

- dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Damara, F., Sampang, A. K., Timur, J., Skripsi, P., Nur, :, Amin, I., & Si, M. (2022). *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur*.
- Dewa dan Heni Purwaningsih. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian *stunting* pada balita di Kabupaten Malang. *Jurnal Vol 1*, Malang.
- Fitriani, Barangkau, Masrah Hasan, Ruslang, Eka Hardianti, Khaeria, Resti Oktavia, & Selpiana. (2022). Cegah Stunting Itu Penting! *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JurDikMas) Sosiosaintifik*, 4(2), 63–67.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021. *Buana Ilmu*, 2(1). <https://doi.org/10.36805/bi.v2i1.301>
- Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/209/406.001.3/2023 tentang *Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Trenggalek*
- Liza Diah A. R. (2023). *Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Studi di Kecamatan Sulang)* (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- Megawati, G., & Wiramihardja, S. (2019). Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Stunting. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 8(3), 154-159.
- Muajijin, M. (2023). *Ribuan Anak di Trenggalek Alami Gizi Buruk Akut*. Beritasatu.Com.<https://www.beritasatu.com/nusantara/1048661/ribuan-anak-di-trenggalek-alami-gizi-buruk-akut>
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 200-207.
- Simangungsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Yuli Zulaikha. (2021) *Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting: Studi Kasus Di Puskesmas Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas*. *Jurnal Kesehatan*.